

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat

YARNES A DIMES
MASJE PANGKEY
NOVVA PLANGITEN

Abstract

The General Election Commission's performance in organizing regional elections for West Halmahera Regency. This study uses qualitative methods (observation, in-depth interviews (Indepeth Interview), Documentation). The informants of this research were 9 people including, the Chairperson of the West Halmahera KPU, the Elected Regent of West Halmahera Regency, the Chairperson of the DPC democrat, the head of the Supervisory Committee of West Halmahera Regency, the Subdistrict Supervisory Committee, and several community members. The collection techniques used were interviews, while the data analysis was carried out with qualitative analysis techniques based on the results of this study drawn conclusions: KPUD performance is a policy process in carrying out the duties and responsibilities to produce good governance in West Halmahera regency.

Keywords: Changing Service and Performance Effectiveness.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan Pemilu harus di laksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Masih adanya sengketa dalam perhitungan surat suara oleh pihak calon yang terpilih dengan calon yang kalah dalam pemilihan kepa Daerah Tahun 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, dan peraturan KPU No 9 Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, dan peraturan KPU No 9 Tahun 2015.

Definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Jimly Asshiddiqe dalam bukunya yang berjudul *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Mengordinasikan dan memantau terhadap PEMILU
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilu;
- d. Menerima laporan hasil pemilu dari komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
- e. Menonaktifkan sementara dan/ atau menegakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang yang ditetapkan Undang-undang

Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat

Menurut Ridwan HR,(2006.) pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi di namakan jabatan, jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.

Konsep Kinerja

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salasatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Wahyudi kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik setidaknya berkaitan erat

dengan efesiensi, efektifitas, keadilan dan daya tangkap. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan Kabupaten Halmahera Barat yang mempunyai pemimpin yang berintegritas dan mempunyai kapabilitas. Hasibuan (2002.)

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan KPU, organisasi di susun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas. Menurut Simamora (2003), kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sedangkan Shadily (1992:425), menyatakan kinerja atau performance adalah beda guna prestasi atau hasil.

Menurut Otley dalam Mahmudi (2005: 6), mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut.

Menurut Rogers daam Mahmudi (2005: 6), mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*) karena hasil kerja member keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebut dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan

penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Efisiensi atau suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Efektifitas adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan barang dan jasa dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu.

Keadilan ialah: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Daya tangkap ialah: kemampuan memahami apa yang ditangkap atau diterima oleh panca indra.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penyelenggaraan PEMILUKADA Tahun 2015 bisa dilihat dari tidak adanya kendala dalam sumber daya keuangan, merupakan suatu hal esensial untuk menjamin aktifitas kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.

Efektifitas adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat puas atau tidak puas.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa pada aspek kualitas layanan KPUD Halmahera Barat dikatakan optimal KPUD Halmahera Barat terus meningkatkan kualitas layanan informasi kedepannya kepada masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari pemberian informasi membuka diri transparan dan bisa dipertanggung jawabkan tidak menutup diri terhadap informasi yang masuk maupun yang perlu disampaikan.

keadilan KPUD Halmahera Barat masih dikatakan kurang optimal karena kurang tegas dalam pengawasan disaat masa tenang pemilihan hal ini juga adanya gugatan sampai

ke mahkama konstitusi yang pada putusan akhir KPUD Halmahera Barat dianggap bersih atau tidak bersalah dan seperti apa yang penulis asumsikan pada awal pengamatan itu hanya sebatas dugaan saja.

KPUD Kabupaten Halmahera Barat selalu mempersiapkan diri menerima kedatangan peserta bakal calon, menyiapkan formulir pendaftaran bagi peserta calon PEMILUKADA lengkap dengan persyaratan yang harus dipenuhi selain itu juga KPUD menindak lanjuti complain melalui rapat musyawara sesama fungsioner dan juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam persiapan pemilukada kepada para pegawai sebelum dimulainya pesta demokrasi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada bab sebelum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum masih belum optimal.

1. efisiensi KPUD Kabupaten Halmahera Barat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dikatakan optimal, melalui usaha dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab KPUD.
2. Efektifitas KPUD Kabupaten Halmahera Barat dalam melayani para peserta PEMILUKADA dalam penelitian ini dikategorikan baik.
3. Keadilan KPUD Kabupaten Halmahera Barat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dikatakan kurang optimal.
4. Daya tangkap KPUD Kabupaten Halmahera Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat dapat dikatakan optimal.

SARAN

1. Hendaknya KPUD Kabupaten Halmahera Barat lebih meningkatkan

- pemahaman kepada masyarakat tentang penyelenggaraan PEMILUKADA dengan melakukan pendidikan politik/sosialisasi politik kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pendidikan politik melalui media masa atau elektronik.
2. Hendaknya KPUD Halmahera Barat terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana pengaduan yang lebih banyak lagi seperti pos pengaduan, membuat website khusus, KPUD Halmahera Barat yang bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja.
 3. Diharapkan KPUD Halmahera Barat selalu menindak lanjuti masalah dengan penyelesaian yang tepat seperti bermusyawarah atau mengadakan rapat seluruh anggota beserta karyawan, menerima kritik dan saran dari pihak manapun dan mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada dengan baik.
 4. KPUD Halmahera Barat hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar dapat memahami ketentuan tahapan-tahapan dalam proses pemilihan kepala daerah, bersikap jujur dan tegas terhadap aturan yang berlaku dan selalu mengadakan musyawara dalam setiap pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed Dan Makmur Amir, *Pemilihan Umum Dan Partai Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Fakultas Hukum Unifersitas Indonesia, Jakarta 2006, Cetakan II.
- Dr. Arifin Tahir, M.Si. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung 2015.
- Foster, Bill, Dan Karen R. Seeker, *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja*

Kariyawan, Terjemahan Dari :”Coaching For Peak Employee Performance”. Jakarta : Penerbit PPM, 1997

- Ibramsyah Amirudin S.H., M.H *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Organisasi: Penerbit Laksbang Grafika Edisi I Cetakan Ke-2 Maret 2016*
- Ilyas Yaslis 2005. *Menajemen sumber daya manusia*. Liberty: Jokjakarta.
- Janedjri M. Gaffar *Demokrasi dan Pemilu di Indonesi* penerbit konstitusi press (Konpres) 2013.
- Jerome, Paul J., *Mengevaluasi Kinerja Kariawan*, Terjemahan Dari : Evaluating Employee Performance.” Jakarta : Penerbit PPM, 2001
- Jimi Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Konpers, Jakarta, 2006.
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensistategis Administrasi Public Konsep, Teori Dan Isu*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Moslow, Abraham, *Motivation And Personality*. New York : Harper Collins, 1987.
- Prof. Dr. Mifta Thoha, MPA *Birokrasi politik dan pemilihan umum di Indonesia* penerbit kencana cetakan ke 1 Jakarta 2014.
- Drs.P.K. Poerwantana *partai politik Indonesia* penerbit PT Rineka cipta Jakarta 1994.
- Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak *Menajemen dan Evaluasi Kinerja* penerbit Fakultas Ekonomi Universitas indonesia edisi ke 3,2011
- Rao, T.V., *penilaian prestasi kerja: teori dan praktek*, terjemahan dari: “Performance Appraisals Theory dan practice.” Jakarta; Penerbit PPM, 1996.

- Rostada,Dede, dkk,2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat*, Jakarta.
- Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang dasar 1945*. Citra aditiya bakti, 1986.
- Simamora, Hendry. 2004 *Menajemen sumberdaya manusia*. STIE.YKPN: Jokjakarta
- Sumber-sumber lain www.pengertian *efaluasi kinerja*. Tanggal 2 februari 2017
- Syafiie, Inu Kencana. 2006, *Ilmu administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Yaslis Ilyas, *Kinerja: Teori; Penilaian, Dan Penelitian*. Jakarta: Pusat kajian Ekonomi Kesehatan